



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA 2024 merupakan suatu dokumen bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya dokumen tersebut ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA 2024 merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada satu tahun siklus penganggaran. Demikian juga, merujuk pada model sistem perencanaan yang berlaku bagi instansi pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan Agenda Prioritas Deputi Bidkoo Pollugri yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Sebagai bagian dari Kabinet Kerja, maka tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen RKT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Berikut ini adalah sasaran strategis yang akan dicapai oleh Deputi Bidkoo Pollugri pada tahun 2024 :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral yang Efektif;
- b. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

Strategi pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral yang Efektif**. Program ini adalah program teknis Kemenko Polhukam dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dilingkup Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional;
- 2) Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dalam Dokumen Perencanaan Nasional;
- 3) Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri yang Ditindaklanjuti.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dilakukan melalui satu program generik yaitu **Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemnyang Optimal**. Indikator kinerja program tersebut adalah:

- 1) Nilai SAKIP;
- 2) Nilai PMPRB;
- 3) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;
- 4) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.

Operasionalisasi dari program-program tersebut adalah pelaksanaan kegiatan prioritas nasional dan bidang yang ditentukan dalam RKP 2024. Penanggungjawab kegiatan adalah pejabat eselon II di lingkungan Deputi Bidkoo Pollugri, sedangkan pejabat eselon I berwenang sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit eselon I Deputi Bidkoo Pollugri.

Jakarta, Februari 2024

Deputi Bidang Kordinasi  
Politik Luar Negeri,



Rina P. Soemarno

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>4</b>
I.1. Latar Belakang.....	4
I.2. Maksud dan Tujuan .....	6
I.3. Dasar Hukum Rencana Kerja Tahunan .....	6
I.4. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	7
<b>BAB II Arah Kebijakan Bidang Politik Hukum Keamanan</b> .....	<b>9</b>
II.1. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.....	9
II.2. Target dan Kinerja Nasional Deputi Bidkooor Pollugri .....	9
II.3. Arah Strategi dan Strategi Kebijakan Deputi Bidkooor Pollugri .....	10
II.4. Target dan Kinerja Deputi Bidkooor Pollugri .....	11
<b>BAB III Isu Strategis Program dan Kegiatan</b> .....	<b>12</b>
III.1. Isu Strategis Deputi Bidkooor Pollugri.....	12
III.2. Program Deputi Bidkooor Pollugri .....	13
III.3. Kegiatan Deputi Bidkooor Pollugri.....	13
<b>BAB IV Pendanaan</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB V Penutup</b> .....	<b>16</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

---

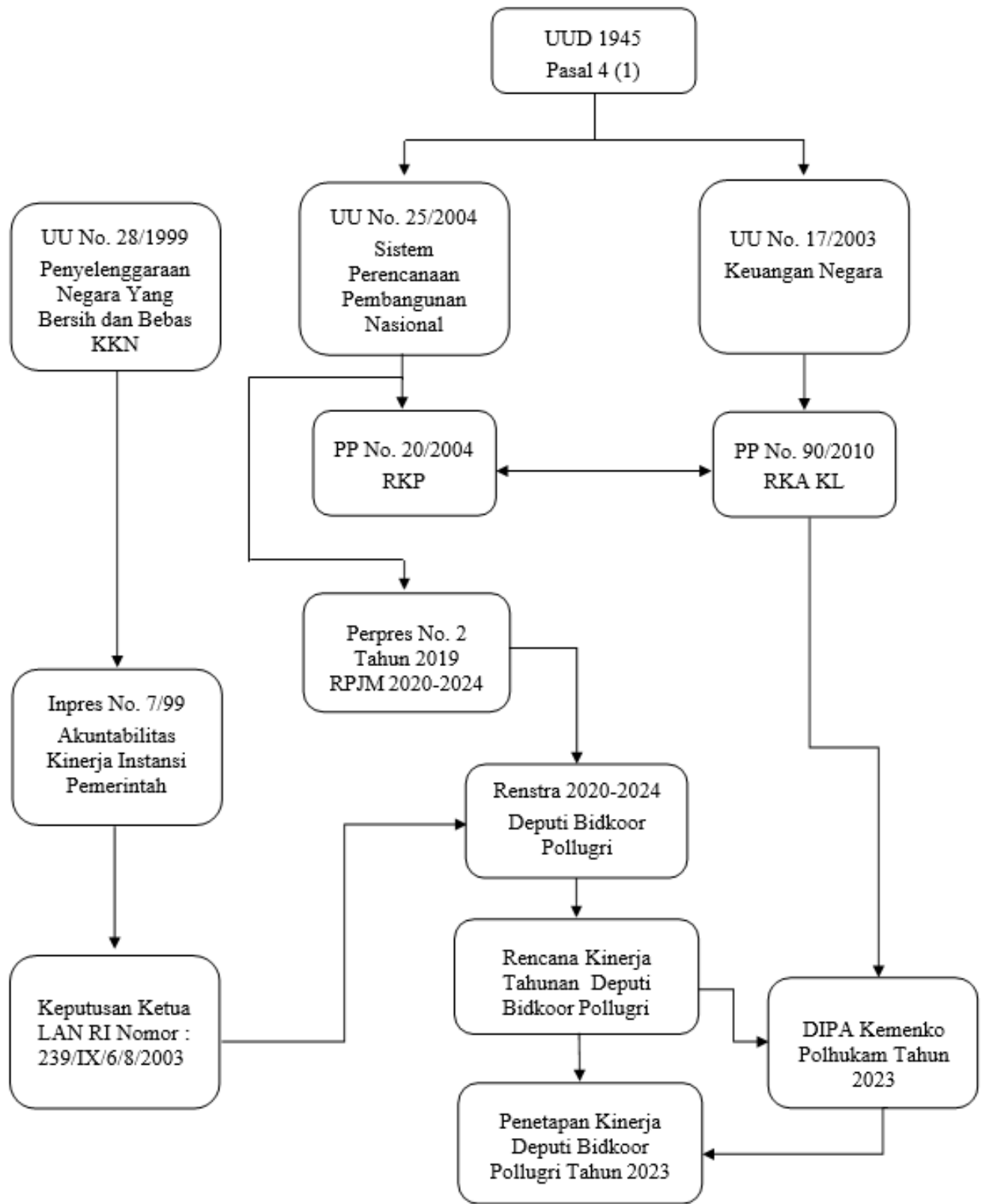
Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dalam melaksanakan kegiatannya. Reformasi telah melahirkan komitmen bagi segenap bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara ringkas RPJMN 2020 - 2024 merupakan dokumen yang menggambarkan arah dan solusi yang ingin dituju untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari agenda pembangunan dalam Renstra Deputi Bidkooor Pollugri Tahun 2020-2024, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dirumuskan dokumen RKT yang berfungsi sebagai penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan laporan akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itu, dokumen RKT 2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL), Penetapan Kinerja (PK) maupun LAKIP Tahun 2024. Selain dari fungsi-fungsi tersebut, dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penetapan rencana operasional dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 ini telah disusun berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk timbulnya kelemahan-kelemahan dalam perumusan maupun implementasinya ataupun disebabkan oleh faktor eksternal berupa perubahan lingkungan strategis organisasi. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk timbulnya kelemahan-kelemahan dalam perumusan maupun implementasinya ataupun disebabkan oleh faktor eksternal berupa perubahan lingkungan strategis organisasi. Oleh sebab itu, jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Secara lengkap posisi perencanaan kinerja tahunan dalam konteks peraturan dan kebijakan yang berlaku dapat dilihat pada bagan berikut ini:



## **I.2 Maksud dan Tujuan**

---

### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidkooor Politik Luar Negeri.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidkooor Pollugri.

## **I.3 Dasar Hukum Rencana Kerja Tahunan**

---

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- 7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 8) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## I.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi capaian kinerja Deputi Pollugri dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Deputi Pollugri pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TA. 2023	Realisasi TA. 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	101,84%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB	(BB) 76,9
	b. Nilai PMPRB	31	31
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4



## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

#### II.1. Arah Kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yang akan ditempuh pada tahun 2024 yaitu dengan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.

Arah Kebijakan
1. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri
2. Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional
3. Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional
4. Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

#### II.2. Target dan Kinerja Nasional Deputi Bidkooor Pollugri

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	76,9
	b. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

### II.3. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidkooor Pollugri

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mendukung Kemenko Polhukam dalam Meningkatkan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. Adapun arah kebijakan dan strategi bidang politik luar negeri disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional selama 5 tahun ke depan yakni:

#### Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Arah Kebijakan	Strategi
Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;</li><li>• Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;</li><li>• Peningkatan kerja sama Internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;</li><li>• Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di Luar Negeri; dan</li><li>• Penguatan peran serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.</li></ul>
Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan penggunaan sumber- sumber dan mekanisme pendanaan baru;</li><li>• Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional;</li><li>• Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi; dan</li><li>• Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional.</li></ul>

<p>Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Nasional; dan</li> <li>• Peningkatan peran serta aktor non- pemerintah dalam diplomasi publik yang Inklusif.</li> </ul>
<p>Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan inisiasi/ posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;</li> <li>• Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;</li> <li>• Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen Internasional; dan</li> <li>• Penataan Peran, Struktur, SDM, dan Fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.</li> </ul>

## II.4. Target dan Kinerja Deputi Pollugri

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidkooor Pollugri diperlukan sasaran strategis yaitu: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri Lintas Sektoral yang Efektif;	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri dalam Dokumen Perencanaan Nasional
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri yang Ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai PMPRB
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidkooor Pollugri maka disusunlah target tujuan Deputi Bidkooor Pollugri beserta indikator tujuan Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional untuk tahun 2024. Adapun target pembangunan yang dikawal oleh Deputi Bidkooor Pollugri Tahun 2024, yaitu:

NO	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024
1	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	91
2	Indeks Citra Indonesia Di Dunia Internasional	4
3	Rencana Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral tahun 2024	6

**BAB III**  
**ISU STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**III.1 Isu Strategis Deputi Bidkooor Pollugri**

---

**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**

- a. **Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri**, dengan strategi:
- Peningkatan dan intensifikasi perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;
  - Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;
  - Peningkatan kerja sama Internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
  - Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di Luar Negeri;
  - Penguatan peran serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.
- b. **Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional**, dengan strategi:
- Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat Nasional;
  - Peningkatan peran serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
- c. **Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global**, dengan strategi:
- Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional danglobal;
  - Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;
  - Peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen Internasional;
  - Penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.

### **III. 2 Program Deputi Bidkoo Pollugri**

---

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputi Bidkoo Pollugri mengawal dua program yakni program teknis dan program generik sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

### **III. 3 Kegiatan Deputi Bidkoo Pollugri**

---

Pelaksanaan program koordinasi pelaksanaan kebijakan yang dikawal oleh Deputi Pollugri terdiri dari lima kegiatan teknis yang berada di bawah Eselon I Deputi Pollugri dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
2. Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa;
3. Koordinasi Kerjasama ASEAN;
4. Koordinasi Kerjasama Multilateral;
5. Sekretaris Deputi Bidkoo Pollugri.

## BAB IV PENDANAAN

Program Deputi Bidkooor Pollugri tahun 2024 mengacu pada agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan pendanaan program Deputi Pollugri, prinsip *money follow program* tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran program dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*.

Alokasi pendanaan pada program Deputi Pollugri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Alokasi (Rp)
1	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	9.018.700.000
2	Program Dukungan Manajemen	1.224.430.000
	<b>Total</b>	<b>10.243.130.000</b>

Agar penyelesaian isu-isu bidang Politik Luar Negeri dapat lebih konkret, maka dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi Pollugri tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional dengan alokasi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### Rincian Anggaran Per Kegiatan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tahun 2024

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal			
4552.ABC	Kebijakan Bidang Politik	9	Dokumen	694.560.000
ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika	4	Rekomendasi	2.500.000.000
ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa	4	Rekomendasi	2.070.000.000
ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN	4	Rekomendasi	2.300.000.000
ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral	4	Rekomendasi	2.148.700.000
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	529.870.000
EBA.962	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	529.870.000
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9	Dokumen	694.560.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen	297.090.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	328.730.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	68.740.000
<b>Total =</b>				<b>10.243.130.000</b>

Di dalam pelaksanaannya, Deputi Bidkooor Pollugri akan memantau secara khusus pelaksanaan program prioritas nasional untuk memastikan peningkatan pada bidang Politik Luar Negeri di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

RKT merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu 1 tahun. Dokumen ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga berisikan indikator dan target kinerja.

Selanjutnya dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini, maka diharapkan ada kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja, antara unit-unit kerja yang ada dalam lingkungan organisasi Kemenko Polhukam sehingga capaian kinerja yang akan diraih dalam kegiatan tahunan serta hasil yang akan dicapai dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Demikian perumusan Rencana Kinerja ini disusun melalui analisis dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Harus dipahami bahwa dinamika lingkungan strategis organisasi di Deputi Bidkoo Pollugri selalu berubah. Oleh sebab itu dibutuhkan fleksibilitas dalam implementasi yang tujuannya adalah peningkatan kinerja organisasi.

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN - TAHUN 2024**

1. PROGRAM : Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal  
 3. KEGIATAN : 4552.ABC - Kebijakan Bidang Politik  
 4552.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 4552.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal  
 4. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4552	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal		
4552.ABC	Kebijakan Bidang Politik		
	a) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	Nilai
	b) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	
	c) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%	Nilai
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	a) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Politik Luar Negeri	4	Nilai
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	a) Nilai SAKIP	76,9 (BB)	Nilai

### 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal			
4552.ABC	Kebijakan Bidang Politik	9	Dokumen	694.560.000
ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika	4	Rekomendasi	2.500.000.000
ABC.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerjasama Amerika dan Eropa	4	Rekomendasi	2.070.000.000
ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN	4	Rekomendasi	2.300.000.000
ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral	4	Rekomendasi	2.148.700.000
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	529.870.000
EBA.962	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	529.870.000
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9	Dokumen	694.560.000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen	297.090.000
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	328.730.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	68.740.000
			<b>Total =</b>	<b>10.243.130.000</b>

Jakarta, Januari 2024  
Deputi Bidkoor Pollugri



Rina P. Soemarno

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**

- 1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
- 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif
- 3. KEGIATAN : Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika
- 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika

5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
<b>4552. ABC.001</b>	<b>Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrikalintas sektoral yang efektif</b>		
4552.ABC.001.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	4	Rekomendasi
4552.ABC.001.002	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	Persentase
4552.ABC.001.003	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang ditindaklanjuti	100	Persentase

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika lintas sektoral yang efektif			
4552.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	4	Rekomendasi	2.500.000.000
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	1	Laporan	661.705.000
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	1	Laporan	881.302.000
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	1	Laporan	712.274.000
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika yang Ditindaklanjuti	1	Laporan	244.719.000
			<b>Total =</b>	<b>2.500.000.000</b>

7. RENCANA KEGIATAN Mendukung Capaian Output

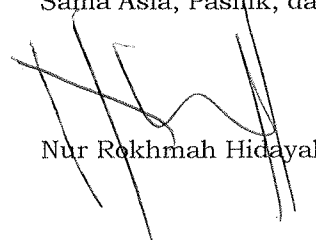
Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan TW			
		I	II	III	IV
4552.ABC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika lintas sektoral yang efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu dan Perkembangan Kerja Sama Bidang Polhukam dan/atau Lintas Sektoral antara RI dengan Negara Mitra di Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Tahun 2024 (termasuk pengawalan dokumen perencanaan nasional, perundingan perbatasan, penanganan kejahatan transnasional, perwujudan kedaulatan NKRI di mata internasional)	X			
	2. Rapat Koordinasi Identifikasi Tantangan dan Rencana Kerja Satuan Tugas Penanganan WNI Luar Negeri yang Terasosiasi FTF Tahun 2024	X			
	3. Rapat Koordinasi Identifikasi Tantangan dan Rencana Kerja Gugus Tugas PP TPPO Tahun 2024, khususnya terkait penanganan perlindungan WNI dari TPPO di luar negeri	X			
	4. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu dan Tantangan Penanganan Pencurian Ikan oleh Nelayan Indonesia di Wilayah Perairan Negara Tetangga Tahun 2024	X			
	5. Rapat Koordinasi Identifikasi Rencana Kerja K/L untuk Penguatan Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik Selatan dengan Merujuk Rencana <i>Grand Design</i> Strategi Kebijakan <i>Pacific Elevation</i>		X		
	6. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu dan Tantangan Pengelolaan Konflik Kawasan dalam rangka perlindungan WNI dan aset negara di luar negeri		X		
	7. Rapat Koordinasi Penjajakan Pembentukan <i>High Level Dialogue</i> Menko Polhukam dan <i>National Security Council (NSC) Malaysia</i>			X	
	8. Rapat Koordinasi Identifikasi dan Penyusunan Agenda Pertemuan <i>Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan Pakistan di Indonesia		X		
	9. Rapat Koordinasi Identifikasi dan Penyusunan Agenda Pertemuan ke-10 <i>Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM)</i> dan Pertemuan ke-5 <i>Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM)</i> yang diketuai bersama oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia di Indonesia		X		
	10. Rapat Koordinasi Identifikasi dan Penyusunan Agenda Pertemuan <i>Indonesia-Thailand Security Consultation</i> antara Sesmenko Polhukam dan Sekjen <i>National Security Council (NSC) Thailand</i> di Thailand			X	
	11. Rapat Koordinasi Identifikasi dan Penyusunan Agenda Pertemuan <i>Indonesia-India Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dengan <i>National Security Adviser</i> India			X	
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika				
	1. Rapat Koordinasi Analisa Perkembangan Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Polhukam dengan Negara-Negara Mitra Strategis di Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Tahun 2024 (termasuk pengawalan dokumen perencanaan nasional, perundingan perbatasan, penanganan kejahatan transnasional, perwujudan kedaulatan NKRI di mata internasional)	X	X	X	X
	2. Rapat Koordinasi Analisa Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF Tahun 2024 (berkala, setiap triwulan)	X	X	X	X

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan TW			
		I	II	III	IV
	3. Rapat Koordinasi Analisa Pelaksanaan Rencana Kerja Gugus Tugas PP TPPO Tahun 2024, khususnya terkait penanganan perlindungan WNI dari TPPO di luar negeri (berkala, setiap triwulan)	X	X	X	X
	4. Rapat Koordinasi Analisa Optimalisasi Penanganan Pencurian Ikan oleh Nelayan Indonesia di Wilayah Perairan Negara Tetangga Tahun 2024		X		
	5. Rapat Koordinasi Analisa Penguatan Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik Selatan dengan Merujuk Rencana <i>Grand Design</i> Strategi Kebijakan <i>Pacific Elevation</i>		X		
	6. Rapat Koordinasi Analisa Pengelolaan Konflik Kawasan dalam rangka perlindungan WNI dan aset negara di luar negeri		X		
	7. Kunjungan kerja ke Malaysia dalam rangka Penjajakan Pembentukan <i>High Level Dialogue</i> Menko Polhukam dan <i>National Security Council</i> (NSC) Malaysia			X	
	8. Rapat Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Indonesia-Pakistan dalam rangka Penyusunan <i>Chair's Note</i> Menko Polhukam pada Pertemuan <i>Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan Pakistan di Jakarta			X	
	9. Rapat Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Indonesia di Asia Pasifik dalam rangka Penyusunan <i>Chair's Note</i> Menko Polhukam pada Pertemuan ke-10 <i>Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security</i> (MCM) dan Pertemuan ke-5 <i>Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security</i> (SRM) yang diketuai bersama oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia		X		
	10. Rapat Koordinasi membahas Rencana Pelaksanaan Pertemuan <i>Indonesia-Thailand Security Consultation</i> antara Sesmenko Polhukam dan Sekjen <i>National Security Council</i> (NSC) Thailand di Thailand			X	
	11. Rapat Koordinasi membahas Rencana Pelaksanaan Pertemuan ke-3 <i>Indonesia-India Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dengan <i>National Security Adviser</i> India			X	
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika				
	1. Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Optimalisasi Kerja Sama Bidang Polhukam dan/atau Lintas Sektoral dengan Negara-Negara Mitra Strategis di Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Tahun 2024 (termasuk pengawalan dokumen perencanaan nasional, perundingan perbatasan, penanganan kejahatan transnasional, perwujudan kedaulatan NKRI di mata internasional)			X	
	2. Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi dan Pembaruan Regulasi Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF			X	X
	3. Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi untuk Perbaikan dan Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO, khususnya terkait penanganan perlindungan WNI dari TPPO di luar negeri (berkala, setiap triwulan)			X	
	4. Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi untuk Penanganan Pencurian Ikan oleh Nelayan Indonesia di Wilayah Perairan Negara Tetangga		X	X	X
	5. Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Penyelerasan Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik Selatan dengan Merujuk Rencana <i>Grand Design</i> Strategi Kebijakan <i>Pacific Elevation</i>			X	

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan TW			
		I	II	III	IV
	6. <i>Focus Group Discussion</i> Membahas Rencana Kontijensi Pengelolaan Konflik Kawasan dalam rangka perlindungan WNI dan aset negara di luar negeri			X	
	7. Rapat Koordinasi Pematangan Pembentukan <i>High Level Dialogue</i> Menko Polhukam dan <i>National Security Council (NSC)</i> Malaysia dengan K/L terkait			X	
	8. Menyelenggarakan Pertemuan <i>Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan Pakistan di Indonesia			X	
	9. Menyelenggarakan Pertemuan ke-10 <i>Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM)</i> dan Pertemuan ke-5 <i>Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM)</i> yang diketuai bersama oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia di Indonesia		X		
	10. Kunjungan Kerja ke Thailand dalam rangka melaksanakan Pertemuan <i>Indonesia-Thailand Security Consultation</i> antara Sesmenko Polhukam dan Sekjen <i>National Security Council (NSC)</i> Thailand di Thailand			X	
	11. Kunjungan Kerja ke India dalam rangka melaksanakan Pertemuan ke-3 <i>Indonesia-India Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dengan <i>National Security Adviser</i> India				X
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika				
	1. Rapat Koordinasi Pengendalian Tindak Lanjut Rekomendasi Optimalisasi Kerja Sama Bidang Polhukam dengan Negara-Negara Mitra Strategis di Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika Tahun 2024 (termasuk pengawalan dokumen perencanaan nasional, perundingan perbatasan, penanganan kejahatan transnasional, perwujudan kedaulatan NKRI di mata internasional)				X
	2. Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Rekomendasi dan Kegiatan Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi FTF Tahun 2024				X
	3. Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Rekomendasi dan Kegiatan Pencegahan dan Penanganan TPPO, khususnya terkait penanganan perlindungan WNI dari TPPO di luar negeri Tahun 2024				X
	4. Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Rekomendasi dan Kegiatan Penanganan Pencurian Ikan oleh Nelayan Indonesia di Wilayah Perairan Negara Tetangga Tahun 2024				X
	5. Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelerasan Diplomasi Kedaulatan di Kawasan Pasifik Selatan dengan Merujuk Rencana Grand Design Strategi Kebijakan <i>Pacific Elevation</i>				X
	6. Rapat Koordinasi Pengendalian Rencana Kontijensi Pengelolaan Konflik Kawasan dalam rangka perlindungan WNI dan aset negara di luar negeri				X
	7. Rapat Koordinasi Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Pertemuan <i>Indonesia-Pakistan Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan Pakistan			X	
	8. Rapat Koordinasi Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Pertemuan ke-10 <i>Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM)</i> dan Pertemuan ke-5 <i>Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security (SRM)</i> yang diketuai bersama oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia			X	

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan TW			
		I	II	III	IV
	9. Rapat Koordinasi Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Pertemuan <i>Indonesia-Thailand Security Consultation</i> antara Sesmenko Polhukam dan Sekjen <i>National Security Council (NSC)</i> Thailand di Thailand				X
	10. Rapat Koordinasi Pengendalian Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Pertemuan ke-3 <i>Indonesia-India Security Dialogue</i> antara Menko Polhukam dengan <i>National Security Adviser</i> India				X

Jakarta, Januari 2024  
Asisten Deputi Koordinasi Kerja  
Sama Asia, Pasifik, dan Afrika,



Nur Rokhmah Hidayah



## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif  
 3. KEGIATAN : Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa  
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa

### 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
<b>4552. ABC.002</b>	<b>Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa lintas sektoral yang efektif</b>		
4552.ABC.002.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa	4	Rekomendasi
4552.ABC.002.002	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	Persentase
4552.ABC.002.003	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti	100	Persentase

### 6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552.ABC.002	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa lintas sektoral yang efektif			
4552.ABC.002	Rekomendasi kebijakan Bidang Kerja sama Amerika dan Eropa	4	Rekomendasi	2,070,000,000
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Amerika dan Eropa	1	Laporan	228,513,000
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa	1	Laporan	484,654,000
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa	1	Laporan	646,622,000
054	Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa	1	Laporan	710,211,000
			<b>Total =</b>	<b>2,070,000,000</b>

### 7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)			
		I	II	III	IV
4552.ABC.002	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa lintas sektoral yang efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Amerika dan Eropa				
	1. Rapat Koordinasi <i>Stock Taking</i> Isu-Isu Bidang Polhukam dengan Negara-Negara Mitra Strategis di Kawasan Eropa	x			

	2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perumusan Pedoman Hubungan Diplomatik RI-Rusia-Ukraina	x			
	3. Rapat Koordinasi <i>Stock Taking</i> Isu-Isu Bidang Polhukam dengan Negara-Negara Mitra Strategis di Kawasan Amerika	x			
	4. Rapat Koordinasi membahas Peningkatan Citra Positif Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa	x			
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa				
	1. Kunjungan Kerja ke Brussels dalam rangka Menghadiri Forum Dialog RI-Uni Eropa		x		
	2. Rapat Koordinasi membahas Rencana Pelaksanaan Pertemuan ke-1 <i>Security Dialogue Indonesia-Türkiye</i> Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri Turki		x		
	3. Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat/Kunjungan Kerja ke Rusia dalam rangka menghadiri Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-7 Bidang Keamanan antara Menko Polhukam dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia		x		
	4. Rapat Koordinasi membahas Penyusunan Prosedur Pendaftaran dan Pemasangan Alat Komunikasi Perwakilan Asing/Organisasi Internasional		x		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa				
	1. Pelaksanaan Monev Bidang Keamanan terhadap Program USPC di Wilayah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur		x	x	x
	2. Menyelenggarakan Pertemuan <i>Security Dialogue</i> Pertama antara Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri Turki			x	
	3. FGD mengenai Perumusan Skenario Diplomasi Indonesia Menghadapi Dinamika Politik dan Keamanan di Kawasan Amerika dan Eropa			x	
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti				
	1. Rakor membahas Implementasi dan Tindak Lanjut <i>Road Map</i> Pengembangan Diaspora				x
	2. Rapat Koordinasi membahas Tindak Lanjut Hasil Pertemuan <i>Security Dialogue</i> Pertama antara Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri Turki				x

Jakarta, Januari 2024  
Asdep Kerma Amerop

Vitto R. Tahar  
NIP. 197301241997101001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**

1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik. Hukum. dan Keamanan  
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif  
 3. KEGIATAN : Koordinasi Kerja Sama ASEAN  
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN

5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
<b>4552. ABC.003</b>	<b>Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama ASEAN lintas sektoral yang efektif</b>		
4552.PBC.003.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN	4	Rekomendasi
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	Persentase
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN yang ditindaklanjuti	100	Persentase

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2023	SATUAN	ALOKASI 2023
4552.PBC.003.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama ASEAN lintas sektoral yang efektif			
4552.PBC.003	Rekomendasi kebijakan Bidang Kerja sama ASEAN	4	Rekomendasi	
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama ASEAN	1	Laporan	410.388.000
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama ASEAN	1	Laporan	562.691.000
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN	1	Laporan	799.035.000
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN yang Ditindaklanjuti	1	Laporan	527.886.000
	<b>Total =</b>			<b>2.300.000.000</b>

7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4552.PBC.001	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama ASEAN lintas sektoral yang efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama ASEAN				
	1. Rapat <i>Stocktaking</i> Isu Politik dan Keamanan Pilar Masyarakat Polkam ASEAN	X			
	2. Rakor Pembahasan Isu Maritim ASEAN	X			
	3. Rakor Pembahasan Isu Prioritas pada Keketuaan Laos di ASEAN Tahun 2024	X			

	4. Rakor Pembahasan Implementasi <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> (AOIP)		X		
	5. Rakor Pembahasan Kerja Sama Security Working Group pada BIMP-EAGA		X		
	6. Rakor Pembahasan Isu Penanganan TPPO di ASEAN			X	
	7. Rakor Monev Implementasi RAN ASEAN 2025			X	
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama ASEAN				
	1. FGD Penguatan Kerja Sama Siber di ASEAN		X		
	2. Round Table Discussion Kerja Sama Pilar Polkam ASEAN bersama Pusat Studi ASEAN		X		
	3. Partisipasi Delri pada Pertemuan AMMTC dan SOMTC		X		
	4. Partisipasi Delri Pertemuan ADMM dan ADMM Retreat			X	
	5. Partisipasi Delri pada perundingan ASEAN-China JWG on DOC			X	
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama ASEAN				
	1. Rapat Koordinasi penguatan kerja sama pemberantasan TPPO di ASEAN		X		
	2. Rapat Koordinasi penguatan kerja sama Security WG pada BIMP-EAGA		X		
	3. Rapat Koordinasi penguatan dan pemajuan HAM di Kawasan		X		
	4. Rapat Koordinasi Penyusunan Hotline of Communication DOC			X	
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama ASEAN yang Ditindaklanjuti				
	1. Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan APSC Council ke-28			X	
	2. Kunjungan Kerja Menko Polhukam pada Pertemuan APSC Council ke-28 dan Rangkaian KTT ASEAN				X
	3. Rapat Koordinasi Pilar Polkam ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia				X

Jakarta, Januari 2024  
Asdep Kerma ASEAN



Abdullah Zulkifli  
NIP. 197111261999031001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**

- 1. PROGRAM : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif
- 3. KEGIATAN : Koordinasi Kerja Sama Multilateral
- 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral

5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
<b>4552. ABC.003</b>	<b>Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Multilateral lintas sektoral yang efektif</b>		
4552.ABC.003.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral	4	Rekomendasi
4552.ABC.003.002	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Multilateral yang mendukung dokumen perencanaan nasional	100	Persentase
4552.ABC.003.003	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Multilateral yang ditindaklanjuti	100	Persentase

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552.ABC.003	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Multilateral lintas sektoral yang efektif			
4552.ABC.003	Rekomendasi kebijakan Bidang Kerja sama Multilateral	4	Rekomendasi	
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Multilateral	1	Laporan	306,580,000
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Multilateral	1	Laporan	352,996,000
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Multilateral	1	Laporan	302,931,000
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral yang Ditindaklanjuti	1	Laporan	857,656,000
<b>Total =</b>				<b>1,820,163,000</b>

7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		I	II	III	IV
4552.ABC.004	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kerja Sama Multilateral lintas sektoral yang efektif				
051	Identifikasi Permasalahan Kerja Sama Multilateral				
	1. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu-isu Kerja Sama Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Internasional	X			
	2. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu-isu Kerja Sama Bidang Hukum, HAM, dan Kemanusiaan Internasional	X			
	3. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Masukan Indonesia untuk <i>the 2023 TIP Report</i>	X			
	4. Rapat Koordinasi Membahas <i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan Matriks Self-Assement Questionaire (SAQ) UNTOC Review Mechanism Indonesia	X			
	5. Rapat Koordinasi Membahas Persiapan Akhir Partisipasi Indonesia di Dialog Konstruktif ICESCR	X			
	6. Rapat Awal Mekanisme HAM Internasional pada Program Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional Tahun 2024		X		
052	Analisis Kebijakan Kerja Sama Multilateral				
	1. Partisipasi pada Pertemuan Sesi Regular dan <i>Special Session</i> DHAM PBB		X		
	2. Rapat Persiapan FGD Revisi Pokja Pelaporan Instrumen HAM PBB		X		
	3. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Revisi Pokja Pelaporan Instrumen HAM PBB		X		
	4. Rapat Koordinasi Penanganan Terorisme Internasional		X		
	5. Rapat Koordinasi Penyusunan Reviu Implementasi UNTOC di Indonesia		X		
053	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Multilateral				
	1. Rapat Koordinasi Tata Kelola Penanganan Pengungsi			X	
	2. Rapat Koordinasi Mekanisme Koordinasi Kedaruratan KBRN di Indonesia			X	
	3. Partisipasi pada Pertemuan Perundingan Penyusunan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Siber PBB di Wina dan New York			X	
054	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Multilateral yang Ditindaklanjuti				
	1. Rapat Koordinasi Dukungan Pencalonan Pemri di berbagai OI dan Badan Subsider PBB			X	
	2. Rapat Persiapan Pertemuan dengan Executive Director UNODC terkait TPPO				X
	3. Kunjungan Kerja dalam rangka Pertemuan dengan Executive Director UNODC terkait TPPO di Wina, Austria				X

Jakarta, Januari 2024  
Asdep Koordinasi Kerja Sama Multilateral

Adi Winarso

**RENCANA KINERJA TAHUNAN - TAHUN 2024**

1. PROGRAM : Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  
 2. SASARAN PROGRAM (ESELON I) : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal  
 3. KEGIATAN : 4552.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 4552.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal  
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON II) : Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
 5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN
4552	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal		
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	a) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Politik Luar Negeri	4	Nilai
	b) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	94	Nilai
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	a) Nilai SAKIP	BB	Nilai
	b) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Politik Luar Negeri	87	Nilai

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET 2024	SATUAN	ALOKASI 2024
4552	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal			
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	529.870.000
962.051	Operasional Manajemen Umum	1	Layanan	268.000.000
962.052	Layanan Tata Usaha dan Umum	1	Layanan	261.870.000
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9	Dokumen	694.560.000
952.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen	297.090.000
953.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	328.730.000
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen	68.740.000
			<b>Total =</b>	<b>1.224.430.000</b>

7. RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG CAPAIAN OUTPUT

Kode	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Triwulan)			
		I	II	III	IV
4552.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
962.051	Operasional Manajemen Umum				
	1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Sekretariat Deputy Bidkooor Pollugri	X	X	X	X
	2. Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Tentang Jabatan Fungsional di Unit Kerja Deputy Bidkooor Pollugri 2024	X			
	3. Rakor Penyusunan Indikator Reformasi Birokrasi Tematik Unit Deputy Bidkooor Pollugri.		X		
	4. Penyusunan Realisasi Sasasaran Kerja Pegawai (SKP)				X
	5. Evaluasi Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Politik Luar Negeri 2024				X
962.052	Layanan Tata Usaha dan Umum				
	1. Penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Pengelolaan Kearsipan 2024	X			
	2. Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi Versi 3.0		X		
	3. Bimbingan Teknis Penulisan Pelaporan		X		
	4. Bimbingan Teknis Penulisan di Media Sosial			X	
	5. Monev Pengelolaan Arsip Tahun 2023 di Lingkungan Dep Bidkooor Pollugri			X	
	6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dan Ketata Usahaan 2024				X
4552.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
952.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
	1. Dialog Kinerja T.A. 2024 dan Penetapan Perjanjian Kinerja T.A. 2024	X			
	2. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024	X			
	3. Penyusunan TOR/KAK dan RAB Tahun 2025	X			
	4. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025				X
953.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
	1. Monitoring dan Evaluasi Periode Triwulan I		X		
	2. Monitoring dan Evaluasi Periode Triwulan II			X	
	3. Monitoring dan Evaluasi Periode Triwulan III				X
	4. Monitoring dan Evaluasi Periode Triwulan IV				X
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja				
	1. Penyusunan Rancangan Renstra Deputy Bidkooor Pollugri 2025-2029			X	X

Jakarta, Januari 2024  
 Sekretaris Deputy Bidkooor Pollugri

Dedy Ghazi Elsyaf  
 NRP. 514575